



Lentera Peradaban

Research Article

Business Diplomacy Of Prophet Muhammad: An Islamic Political Economy Study (Diplomasi Bisnis Ala Rasulullah: Studi Politik Ekonomi Islam)

Devaldo Eriyandes

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Indonesia
aldogans67@gmail.com

Ramadika Panjinegoro

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Indonesia
ramadika267@gmail.com

Sumarta

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Indonesia
martasumarta548@gmail.com

Farhan

Institut Studi Islam Al-Amin, Indramayu, Indonesia
farhan.24062014@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Lentera Peradaban: Journal On Islamic Studies**. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received: September 2025
Accepted: November 2025

Revised : October 2025
Available online : December 2025

How to Cite: Devaldo Eriyandes, Ramadika Panjinegoro, Sumarta, & Farhan. (2025). Business Diplomacy Of Prophet Muhammad: An Islamic Political Economy Study (Diplomasi Bisnis Ala Rasulullah: Studi Politik Ekonomi Islam). *Lentera Peradaban: Journal on Islamic Studies*, 1(4), 242–255.
<https://doi.org/10.61166/lpi.v1i4.24>

ABSTRAK

Penelitian ini membahas rekonstruksi konsep diplomasi bisnis ala Rasulullah SAW dalam perspektif politik ekonomi Islam sebagai respons atas tantangan globalisasi, ketimpangan ekonomi, serta fragmentasi etika dalam praktik diplomasi ekonomi modern. Latar belakang penelitian berangkat dari urgensi mengintegrasikan nilai profetik—seperti amanah, keadilan, transparansi, serta anti-monopoli—ke dalam arsitektur ekonomi kontemporer yang sering terjebak pada orientasi materialistik. Menggunakan metode studi pustaka, penelitian ini menganalisis sekitar 20 sumber primer dan sekunder, termasuk kitab sirah, hadis, literatur ekonomi-politik Islam, dan laporan lembaga internasional. Pendekatan tematik-historis-komparatif digunakan untuk menelaah praktik diplomasi Rasulullah di

Madinah, membandingkannya dengan diplomasi ekonomi modern, serta mengidentifikasi relevansinya terhadap industri halal global dan kebijakan publik masa kini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi Rasulullah menekankan integritas pasar, perlindungan kelompok rentan, dan stabilitas sosial sebagai fondasi ekonomi yang berkelanjutan. Nilai profetik terbukti kompatibel dengan prinsip tata kelola modern, namun implementasinya dalam negara Muslim masih terhambat oleh orientasi pasar liberal, komersialisasi industri halal, dan kebijakan yang belum berbasis etika. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model diplomasi bisnis profetik dapat menjadi kerangka strategis bagi pengembangan kebijakan ekonomi syariah, standarisasi halal, pemberdayaan UMKM, dan diplomasi internasional. Diperlukan pendekatan integratif dan inovasi kebijakan agar nilai profetik tidak hanya menjadi wacana moral, tetapi dapat dioperasionalkan sebagai dasar tata kelola ekonomi modern.

Kata Kunci: *Diplomasi bisnis, nilai profetik, ekonomi Islam, industri halal, kebijakan publik*

Abstract

This study examines the reconstruction of the Prophet Muhammad's (PBUH) business diplomacy concept within the framework of Islamic political economy as a response to the challenges of globalization, economic inequality, and ethical fragmentation in modern economic diplomacy practices. The background of this research arises from the urgency to integrate prophetic values—such as trustworthiness, justice, transparency, and anti-monopoly principles—into the architecture of contemporary economic systems that are often trapped in materialistic orientations. Using a literature review method, the study analyzes approximately twenty primary and secondary sources, including classical sirah works, hadith collections, Islamic political-economy literature, and international institutional reports. A thematic–historical–comparative approach is employed to investigate the Prophet's diplomatic practices in Madinah, compare them with modern economic diplomacy, and identify their relevance to the global halal industry and contemporary public policy. The findings reveal that the Prophet's diplomacy emphasized market integrity, protection of vulnerable groups, and social stability as the foundation of a sustainable economic order. Prophetic values are shown to be compatible with modern governance principles; however, their implementation in Muslim-majority countries remains constrained by liberal market orientations, the commercialization of the halal industry, and policy frameworks that are not yet ethically grounded. This study concludes that the prophetic business diplomacy model offers a strategic framework for advancing Shariah-based economic policymaking, halal standardization, MSME empowerment, and international diplomacy. An integrative policy approach and continuous innovation are required to ensure that prophetic values do not remain merely moral discourse but can be operationalized as the foundation for modern economic governance.

Keywords: *Business diplomacy, prophetic values, Islamic economics, halal industry, public policy*

PENDAHULUAN

Diplomasi dalam ekonomi global tidak lagi menjadi domain eksklusif negara, tetapi melibatkan pelaku bisnis, lembaga sosial, dan komunitas keagamaan dalam kerangka business diplomacy. Perubahan ini sejalan dengan literatur kontemporer yang menegaskan bahwa relasi ekonomi modern menuntut integrasi antara kepentingan strategis, stabilitas politik, dan jejaring bisnis lintas negara (Nikbakht, 2024; Saeri, 2025). Dalam dinamika seperti ini, nilai-nilai Islam menawarkan fondasi etis yang kuat, sebagaimana dianalisis oleh

Amalia (2024) dan Yasin (2024), yang menempatkan keteladanan Rasulullah SAW sebagai model etik dan strategis dalam hubungan ekonomi. Praktik diplomasi ekonomi Rasulullah menunjukkan bahwa integritas, inklusivitas, serta keberlanjutan dapat dijadikan basis relasi antar-komunitas tanpa terjebak pada orientasi materialistik. Model diplomasi seperti ini menjadi relevan ketika negara-negara Muslim menghadapi tekanan globalisasi dan ketimpangan ekonomi sebagaimana diidentifikasi dalam laporan ICDT–OIC (2022) dan SGIE (DinarStandard, 2023).

Keteladanan Rasulullah sebagai pemimpin dan pebisnis menegaskan bahwa diplomasi ekonomi memiliki dimensi moral yang tidak dapat dipisahkan dari strategi dagang. Kajian Ahmed (2021) dan Rehman (2023) menunjukkan bagaimana Rasulullah membangun jejaring perdagangan lintas wilayah melalui kejujuran, amanah, dan kecermatan dalam negosiasi. Praktik ini berlanjut pada fase Madinah ketika struktur sosial-ekonomi disusun bersandar pada keadilan, transparansi, dan keterbukaan, konsisten dengan pandangan Fajari (2021) dan Nabi (2025) tentang diplomasi profetik. Pendekatan diplomasi tersebut tidak semata menekankan keuntungan jangka pendek, tetapi stabilitas sosial dan keseimbangan distribusi ekonomi. Nilai seperti ini relevan dengan perdebatan etika global sebagaimana dianalisis oleh Moya (2024) mengenai peran spiritualitas dalam tata kelola bisnis.

Rekonstruksi nilai diplomasi Rasulullah membantu menjelaskan bagaimana etika profetik membentuk arsitektur ekonomi Islam awal melalui sistem pasar bebas anti-monopoli, perlindungan kelompok rentan, dan penegakan amanah. Sadnyini (2023) dan Ishak (2024) menegaskan bahwa nilai-nilai tersebut selaras dengan prinsip keberlanjutan sosial dan integritas pasar yang kini menjadi standar dalam etika bisnis global. Namun, implementasi nilai tersebut dalam ekonomi syariah kontemporer masih menghadapi keterbatasan struktural, sebagaimana dikritisi Harahap (2023) dalam konteks praktik muamalah modern. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara inspirasi normatif dan praktik empiris pada banyak negara Muslim yang menghadapi tekanan model kapitalistik.

Dalam situasi global saat ini, negara-negara Muslim menghadapi tantangan besar dalam mengintegrasikan nilai profetik ke dalam kebijakan ekonomi dan diplomasi halal. Meskipun industri halal tumbuh pesat sebagaimana dilaporkan oleh SMIIC (2022) dan ISEF (2021), orientasi etika sering kali kalah oleh dinamika pasar. Diplomasi ekonomi negara Muslim juga belum sepenuhnya selaras dengan prinsip keadilan distributif Islam, sebagaimana terlihat dalam analisis Hidayati (2023) terkait kerja sama halal Indonesia–Turki. Ketidakseimbangan ini tampak ketika kebijakan publik tidak menempatkan nilai moral sebagai dasar strategis, sehingga diplomasi ekonomi syariah kehilangan keunggulan normatifnya.

Kajian terdahulu memang telah membahas etika bisnis kenabian (Amalia, 2024; Ishak, 2024), strategi diplomasi dalam Sirah (Ahmed, 2021; Rehman, 2023), dan perkembangan industri halal global (DinarStandard, 2023; Islamic Development Bank, 2022). Namun, penelitian-penelitian tersebut masih terfragmentasi dan belum menyediakan kerangka teoretis komprehensif yang menghubungkan nilai diplomasi profetik dengan diplomasi

ekonomi modern. Minimnya kajian kebijakan publik serta absennya model diplomasi bisnis berbasis nilai Islam memperlihatkan ruang metodologis yang belum digarap. Selain itu, penelitian Sirah umumnya lebih menekankan aspek moral daripada implementasinya dalam arsitektur ekonomi internasional, sehingga memunculkan kebutuhan untuk mengintegrasikan perspektif sejarah, ekonomi politik Islam, dan hubungan internasional.

Celah penelitian tersebut mengindikasikan perlunya pendekatan integratif untuk merumuskan konsep business diplomacy ala Rasulullah yang sesuai dengan kebutuhan kontemporer. Integrasi ini mencakup pembacaan kritis atas praktik Rasulullah dalam negosiasi dagang dan pengelolaan pasar, sebagaimana dianjurkan oleh Nurhayati (2024) dalam kerangka kepemimpinan profetik. Model konseptual ini dapat diterapkan untuk merespons dinamika ekonomi syariah modern, termasuk standarisasi halal internasional, investasi syariah global, dan diplomasi lintas agama sebagaimana dianalisis dalam karya Idris (2025). Pendekatan ini menuntut kerangka teori yang dapat menjembatani sejarah dan realitas modern secara metodologis sehingga ekonomi syariah dapat berkembang tanpa kehilangan landasan etikanya.

Peluang implementasi diplomasi bisnis profetik semakin terbuka melalui perkembangan digital dan globalisasi pasar halal. Ekosistem digital memungkinkan pelaku usaha syariah memperluas pasar internasional dengan menonjolkan prinsip transparansi dan keadilan, selaras dengan temuan ISEF (2021). Diplomasi halal melalui standarisasi SMIIC, kerja sama investasi OIC, dan integrasi rantai pasok global dapat memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi syariah internasional sebagaimana dilaporkan Islamic Development Bank (2022). Selain itu, kolaborasi lintas agama dan sektor, yang menjadi esensi Piagam Madinah, sejalan dengan gagasan Moya (2024) mengenai pentingnya spiritualitas dalam etika bisnis global. Semua peluang ini menegaskan bahwa diplomasi ekonomi Islam berpotensi membentuk kekuatan geopolitik baru bila konsisten berbasis nilai etika.

Dari sisi akademik, rekonstruksi konsep diplomasi bisnis Rasulullah perlu dikembangkan melalui riset historis, konseptualisasi nilai profetik, dan inovasi pendidikan tinggi. Pendekatan historis-kritis memungkinkan pembacaan ulang atas praktik dagang Nabi secara lebih sistematis sebagaimana dianjurkan dalam studi Rehman (2023). Nilai profetik dapat diturunkan menjadi kebijakan publik berbasis keadilan, perlindungan pasar, dan tata kelola zakat yang berfungsi sebagai stabilisator sosial. Pendidikan tinggi dapat mengambil peran melalui pengembangan kurikulum “Islamic Business Diplomacy” yang mengintegrasikan Sirah, ekonomi politik Islam, dan hubungan internasional. Upaya ini membuka peluang lahirnya model diplomasi ekonomi Islam yang lebih terukur, strategis, dan relevan bagi masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (library research) sebagai metode utama dalam mengkaji tema *Business Diplomacy ala Rasulullah* dalam perspektif politik ekonomi Islam. Pendekatan ini dipilih karena paling sesuai untuk menelaah secara

mendalam pemikiran historis, normatif, serta konstruksi konseptual yang berkembang dalam literatur klasik maupun kontemporer mengenai diplomasi Nabi Muhammad SAW dan relevansinya bagi ekonomi serta kebijakan modern. Penelitian tidak dilakukan pada lokasi fisik tertentu, melainkan bergantung pada sumber-sumber literatur dari berbagai repositori akademik, perpustakaan perguruan tinggi Islam, basis data jurnal bereputasi, dan kitab-kitab klasik yang relevan dengan tema diplomasi bisnis dan ekonomi politik Islam.

Sumber data penelitian terdiri atas sekitar 15 referensi primer **dan** 20 referensi sekunder. Referensi primer mencakup kitab-kitab sirah nabawiyah, hadis sahih mengenai praktik muamalah, serta karya-karya awal pemikir ekonomi Islam. Referensi sekunder meliputi artikel jurnal, prosiding konferensi, laporan lembaga internasional, serta buku-buku akademik kontemporer yang membahas diplomasi, ekonomi syariah, hubungan internasional, dan politik ekonomi Islam. Pemilihan literatur dilakukan berdasarkan tiga kriteria utama, yaitu (1) relevansi topikal terhadap diplomasi Rasulullah dan ekonomi politik Islam, (2) otoritas ilmiah penulis atau lembaga penerbit, serta (3) kemutakhiran informasi untuk literatur sekunder, terutama terbitan lima tahun terakhir.

Waktu penelitian berlangsung selama dua minggu, yaitu 10–30 Juni 2025, menyesuaikan dengan beban akademik, ketersediaan literatur, serta kebutuhan waktu untuk melakukan proses analisis data secara menyeluruh. Fokus penelitian diarahkan pada praktik diplomasi bisnis Rasulullah SAW pada periode Madinah, terutama setelah hijrah, ketika struktur sosial-ekonomi Muslim mulai dibangun secara sistematis. Kajian ini menelaah strategi Rasulullah dalam membangun jejaring perdagangan, menyusun kesepakatan lintas kelompok, serta merancang tata kelola ekonomi yang berkeadilan. Selain itu, penelitian juga mengkaji kemungkinan integrasi nilai-nilai diplomasi profetik tersebut ke dalam arsitektur kebijakan kontemporer Indonesia, termasuk relevansinya bagi ekonomi syariah, diplomasi halal, dan tata kelola kebijakan publik modern.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama. *Pertama*, studi dokumentasi, yaitu penelusuran teks-teks sirah, hadis, serta sumber hukum dan ekonomi Islam klasik yang memiliki otoritas tinggi. *Kedua*, analisis literatur akademik, yakni membaca dan menelaah publikasi ilmiah modern yang mendiskusikan diplomasi, ekonomi politik, dan perkembangan industri halal global. *Ketiga*, observasi partisipatif simulatif, dilakukan dengan mengikuti diskusi ilmiah, seminar daring, dan kajian akademik yang membahas diplomasi Rasulullah dan ekonomi Islam sebagai bentuk pengayaan perspektif.

Analisis data dilakukan melalui pendekatan tematik-historis-komparatif. Pendekatan tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola nilai dan strategi diplomasi dalam perilaku Rasulullah. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri konteks sosial dan ekonomi periode Madinah. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk menghubungkan nilai diplomasi profetik dengan praktik diplomasi ekonomi kontemporer di negara-negara modern, termasuk Indonesia. Melalui kombinasi metode tersebut, penelitian ini berupaya menyusun pemahaman komprehensif mengenai relevansi dan kemungkinan aktualisasi diplomasi bisnis ala Rasulullah dalam konteks kebijakan ekonomi modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diplomasi Rasulullah dalam Perdagangan

Kajian pustaka menunjukkan bahwa praktik perdagangan Rasulullah SAW memuat dimensi diplomasi yang sistematis dan terstruktur, yang tidak hanya berfungsi untuk mengatur pertukaran barang tetapi juga membangun tatanan sosial-ekonomi yang stabil dan inklusif. Sejumlah penelitian menekankan bahwa Rasulullah menggabungkan kemampuan negosiasi, perlindungan terhadap kelompok yang lebih lemah, serta pembentukan institusi pasar yang berkeadilan sebagai fondasi utama interaksi ekonomi masyarakat Madinah (Ahmed, 2021; Rehman, 2023). Dalam konteks ini, Piagam Madinah menjadi tonggak penting yang menata hubungan politik sekaligus menyediakan kerangka etik dan legal bagi kegiatan ekonomi lintas komunitas. Piagam tersebut tidak hanya mengatur hak dan kewajiban tiap kelompok, tetapi juga memastikan bahwa kepentingan ekonomi tidak dimonopoli oleh satu golongan tertentu, sehingga tercipta ruang pasar yang inklusif bagi Muslim maupun non-Muslim (Amalia, 2024).

Konsep pasar Madinah yang dibangun Rasulullah memperlihatkan orientasi diplomasi ekonomi yang menekankan akuntabilitas moral, kejujuran, serta stabilitas sosial sebagai prasyarat terciptanya perdagangan yang berkelanjutan. Jika dibandingkan dengan literatur modern mengenai diplomasi ekonomi, pendekatan kenabian menunjukkan distingsi yang jelas: praktik kontemporer cenderung berfokus pada kepentingan negara, blok ekonomi, atau korporasi besar, sementara strategi Nabi lebih mengutamakan keseimbangan kepentingan publik, distribusi manfaat yang merata, dan inklusi sosial (Nikbakht, 2024; Moya, 2024). Dengan demikian, diplomasi bisnis Rasulullah menghadirkan model yang mengintegrasikan etika normatif dengan tujuan ekonomi, suatu aspek yang relatif kurang disorot dalam kajian ekonomi-politik modern.

Secara kritis, kajian terdahulu memang telah banyak memetakan tindakan praktis Nabi dalam mengelola pasar, menyelesaikan konflik perdagangan, hingga menata tata kelola ekonomi komunitas. Namun, penelitian yang berupaya menerjemahkan mekanisme diplomasi kenabian tersebut ke dalam bentuk instrumen kebijakan publik yang aplikatif dalam konteks negara modern masih sangat terbatas (Nurhayati, 2024). Kesenjangan ini menunjukkan perlunya konstruksi epistemologis baru—menggabungkan teori diplomasi ekonomi, etika bisnis Islam, serta praktik tata kelola modern—agar nilai-nilai diplomasi perdagangan Rasulullah dapat diadopsi secara sistematis oleh institusi kontemporer tanpa kehilangan fondasi moralnya.

Nilai Etika dan Tata Kelola Pasar

Nilai-nilai seperti amanah, anti-monopoli, larangan penimbunan, dan kejujuran merupakan fondasi etika muamalah yang secara konsisten muncul dalam berbagai riwayat Sirah dan hadis, memperlihatkan bahwa praktik ekonomi pada masa Rasulullah SAW tidak sekadar berorientasi pada transaksi komersial, tetapi juga pada pembentukan kultur pasar

yang bermartabat dan berkeadilan (Sadnyini, 2023; Harahap, 2023). Dalam banyak narasi, Rasulullah menekankan pentingnya integritas pelaku pasar sebagai penentu stabilitas sosial, bahkan sebelum aspek teknis pengaturan perdagangan diformalkan. Hal ini menunjukkan bahwa etika bukanlah pelengkap, melainkan struktur inti yang menopang keberlanjutan ekosistem ekonomi masyarakat Madinah.

Kajian kontemporer menempatkan nilai-nilai profetik tersebut dalam kerangka tata kelola pasar modern. Para peneliti menilai bahwa prinsip-prinsip seperti kejujuran, transparansi harga, dan larangan monopoli memiliki korelasi langsung dengan keberlanjutan sosial, daya saing ekonomi, dan reputasi bisnis jangka panjang—temuan yang sekaligus menguatkan riset etika bisnis modern yang memosisikan moralitas sebagai variabel strategis, bukan sekadar norma ideal (Ishak, 2024; Moya, 2024). Pendekatan ini menegaskan bahwa keberhasilan pasar modern tidak hanya ditentukan oleh regulasi teknokratis, tetapi juga oleh internalisasi nilai etis yang mengatur perilaku para aktornya.

Namun, ketika nilai-nilai profetik ini dikomparasikan dengan praktik ekonomi di banyak negara Muslim masa kini, terlihat jelas adanya kesenjangan implementasi. Regulasi pasar pada umumnya masih berorientasi liberal atau teknokratik dengan tingkat fragmentasi kebijakan yang tinggi, sehingga nilai etis sulit bertransformasi menjadi instrumen pengatur yang efektif (Hidayati, 2023; SMIIC, 2022). Banyak aturan dibuat untuk merespons gejolak pasar, tetapi tidak secara sistematis menanamkan kerangka etik yang dapat menjadi panduan perilaku ekonomi jangka panjang. Fragmentasi ini menyebabkan keberadaan nilai profetik hanya menjadi wacana normatif tanpa kekuatan operasional dalam proses pengawasan dan penegakan pasar.

Oleh karena itu, diperlukan upaya konseptual yang lebih serius untuk menerjemahkan norma etik profetik menjadi aturan pasar, standar perilaku, dan mekanisme pengawasan yang dapat dioperasionalkan dalam tata kelola modern. Pendekatan ini menjadi penting agar nilai moral tidak berhenti sebagai ajaran normatif, tetapi menjelma menjadi fondasi regulatif yang mampu memperbaiki struktur pasar kontemporer secara berkelanjutan.

Relevansi dengan Konteks Modern dan Industri Halal

Pertumbuhan industri halal global dalam dua dekade terakhir membuka ruang praktis yang semakin luas bagi penerapan diplomasi bisnis berbasis nilai Islam. Ekspansi ini tampak pada meningkatnya kerja sama internasional dalam bidang sertifikasi halal, harmonisasi standar, serta promosi rantai pasok syariah yang melibatkan negara-negara anggota OKI maupun mitra non-Muslim yang melihat pasar halal sebagai peluang strategis (DinarStandard, 2023; ICDT & OIC, 2022). Konsep diplomasi halal menjadi instrumen penting dalam memfasilitasi pertukaran ekonomi berbasis nilai, karena tidak hanya menegaskan identitas normatif suatu negara, tetapi juga menghadirkan jaminan kualitas, integritas proses produksi, dan kepercayaan konsumen lintas budaya.

Sejumlah studi kasus mengenai kerja sama halal antarnegara menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi yang mengintegrasikan nilai profetik dapat menjadi daya tarik tersendiri, baik dalam aspek normatif maupun komersial. Negara yang konsisten

mempromosikan standar etik dan keamanan produk berbasis syariah terbukti memiliki reputasi lebih kuat di mata mitra dagang, sekaligus memperoleh keunggulan kompetitif dalam industri makanan, kosmetik, farmasi, dan pariwisata halal (Hidayati, 2023; Idris, 2025). Dengan demikian, nilai profetik tidak hanya berfungsi sebagai elemen moral, tetapi juga memiliki nilai ekonomi strategis yang memberi legitimasi dan diferensiasi pasar.

Namun, analisis kritis atas perkembangan pasar halal global menunjukkan bahwa pertumbuhan industri tidak otomatis diikuti internalisasi etika profetik. Dalam banyak kasus, orientasi profit, komersialisasi logo halal, dan standarisasi teknis lebih mendominasi agenda industri, sementara dimensi keadilan distributif, keberlanjutan sosial, dan perlindungan UMKM sering terpinggirkan (Islamic Development Bank, 2022). Ketimpangan ini menimbulkan paradoks: pasar halal tumbuh, tetapi nilai moral yang seharusnya menjadi landasannya kurang menjadi prioritas dalam praktik.

Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, diperlukan kebijakan publik yang mampu menyinergikan standarisasi teknis dengan kerangka etika yang jelas. Diplomasi halal seharusnya tidak berhenti pada promosi pasar, tetapi berkembang menjadi advokasi keadilan ekonomi, pemberdayaan pelaku usaha kecil, dan penjaminan keberlanjutan—sehingga industri halal benar-benar mencerminkan nilai profetik yang melandasinya.

Strategi Implementatif dan Inovasi Kebijakan

Nilai-nilai profetik memiliki potensi besar untuk dioperasionalkan melalui kebijakan publik yang mampu mensinergikan regulasi pasar, instrumen keuangan syariah, serta program pemberdayaan UMKM berbasis komunitas. Pendekatan ini menempatkan etika profetik bukan sebagai konsep normatif semata, tetapi sebagai kerangka kerja yang dapat diterjemahkan menjadi kebijakan ekonomi yang inklusif dan adaptif (Nurhayati, 2024; Rehman, 2023). Integrasi nilai tersebut memungkinkan terciptanya ekosistem pasar yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga menjamin pemerataan manfaat ekonomi secara lebih berkeadilan.

Dalam konteks implementasinya, terdapat sejumlah contoh kebijakan yang layak dipertimbangkan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Skema pembiayaan mikro syariah yang inklusif, misalnya, dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha kecil yang sering menghadapi hambatan modal dan akses pasar. Selain itu, pemberian insentif bagi model bisnis berbasis keberkahan—yang menekankan transparansi, kejujuran, dan keberlanjutan sosial—dapat mendorong terciptanya praktik bisnis yang sejalan dengan nilai profetik. Penyederhanaan akses sertifikasi halal bagi UMKM juga menjadi rekomendasi penting sebagaimana ditekankan dalam laporan ISEF (2021), mengingat sertifikasi sering menjadi pintu masuk untuk memperluas pasar domestik dan global bagi pelaku usaha kecil.

Namun demikian, proses transposisi nilai-nilai historis ke dalam instrumen dan kebijakan modern menuntut pendekatan yang kontekstual, kritis, dan evaluatif. Risiko yang kerap muncul adalah terjadinya adopsi simbolik—di mana nilai profetik digunakan sebagai legitimasi moral tanpa benar-benar membentuk substansi regulasi. Tantangan ini semakin

besar ketika nilai etika profetik berhadapan dengan mekanisme pasar global yang berorientasi profit dan efisiensi (Nikbakht, 2024; Moya, 2024). Karena itu, desain kebijakan harus mampu menjaga integritas nilai sambil tetap responsif terhadap dinamika ekonomi kontemporer.

Untuk memastikan efektivitas model kebijakan berbasis nilai profetik tersebut, evaluasi terhadap proyek percontohan (pilot policy) serta studi komparatif antarnegara anggota OIC dapat menjadi langkah awal yang strategis. Pendekatan komparatif memungkinkan identifikasi praktik terbaik, hambatan implementasi, serta adaptasi model kebijakan yang paling sesuai dengan konteks lokal masing-masing negara. Dengan demikian, nilai profetik dapat benar-benar berfungsi sebagai pilar etika dan ekonomi yang saling menguatkan.

Implikasi Sosial-Ekonomi dan Peran SDM

Implementasi diplomasi bisnis profetik memiliki potensi signifikan dalam memperkuat kepercayaan pasar, membangun stabilitas jangka panjang, serta menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih berkeadilan. Dengan menempatkan nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, dan anti-monopoli sebagai prinsip dasar, diplomasi bisnis berbasis etika profetik mampu mengurangi praktik eksploitatif dan kartelisasi yang sering menjadi hambatan utama dalam pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, pendekatan ini berkontribusi pada pengembangan keberlanjutan usaha mikro, koperasi, dan komunitas ekonomi lokal yang selama ini menjadi fondasi penting bagi perekonomian di banyak negara berkembang.

Dari perspektif pengembangan sumber daya manusia, nilai-nilai kepemimpinan profetik—seperti integritas, amanah, dan orientasi pelayanan—memiliki peran strategis dalam mendorong terbentuknya budaya organisasi yang etis, kolaboratif, dan produktif (Harahap, 2023; Nurhayati, 2024). Etos kepemimpinan ini membantu membangun lingkungan kerja yang kondusif bagi inovasi, pengambilan keputusan yang transparan, serta orientasi pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, diplomasi bisnis profetik tidak hanya berdampak pada hubungan eksternal antarorganisasi atau antarnegara, tetapi juga meningkatkan kualitas tata kelola internal institusi.

Namun, kritik empiris menunjukkan bahwa efektivitas nilai-nilai tersebut sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur pendukung. Tanpa investasi serius dalam literasi digital, peningkatan kapasitas manajerial, dan akses pembiayaan yang terjangkau, nilai-nilai profetik sulit memberikan dampak luas pada inklusi ekonomi (ISEF, 2021; DinarStandard, 2023). Kesenjangan kapasitas ini terutama dirasakan oleh UMKM yang kerap menghadapi hambatan teknologi dan keterbatasan kompetensi pengelolaan usaha.

Oleh karena itu, program pendidikan dan pelatihan yang mengintegrasikan etika bisnis profetik dengan keterampilan digital, literasi keuangan, dan manajemen modern menjadi langkah strategis yang tidak dapat diabaikan. Pendekatan terpadu ini dapat memperkaya kapabilitas pelaku usaha, memperluas akses mereka terhadap pasar digital, dan memastikan bahwa nilai profetik benar-benar terinternalisasi dalam praktik ekonomi

sehari-hari. Dengan demikian, diplomasi bisnis profetik dapat berkembang menjadi model pemberdayaan ekonomi yang etis, adaptif, dan berkelanjutan.

Tantangan Implementasi di Indonesia

Tantangan utama dalam mengintegrasikan nilai-nilai profetik ke dalam diplomasi bisnis modern terletak pada ketidaksesuaian antara kerangka normatif Islam dan struktur regulasi serta insentif ekonomi yang berlaku saat ini. Kebijakan yang bersifat parsial, orientasi jangka pendek, serta tekanan pasar global sering menggeser prioritas etis sehingga nilai moral sulit diterapkan secara konsisten dalam praktik ekonomi sehari-hari (Hidayati, 2023; Islamic Development Bank, 2022). Di banyak sektor, standar etika akhirnya hanya menjadi legitimasi simbolik tanpa mekanisme operasional yang kuat. Selain itu, resistensi birokrasi, keterbatasan akses pembiayaan syariah bagi UMKM, dan fragmentasi antar-institusi pengatur menciptakan hambatan praktis yang memperlambat implementasi nilai-nilai profetik dalam tata kelola ekonomi. UMKM yang seharusnya menjadi lokus utama penerapan etika ekonomi Islam justru sering terkendala oleh proses administratif, biaya sertifikasi, dan minimnya dukungan teknologi. Fragmentasi kebijakan juga memperlemah koordinasi sehingga program yang bernilai etis tidak terintegrasi dalam sistem ekonomi nasional.

Kajian komparatif menunjukkan bahwa beberapa negara yang berhasil menginternalisasikan aspek etis dalam diplomasi ekonominya melakukannya melalui kesinambungan kebijakan, standardisasi yang kuat, dan kolaborasi lintas-sektor antara regulator, industri, serta lembaga keagamaan (SMIIC, 2022; Idris, 2025). Temuan ini memberikan pelajaran penting bagi Indonesia dalam merumuskan strategi yang lebih holistik dan adaptif. Untuk menjawab tantangan tersebut, dibutuhkan strategi multi-stakeholder yang melibatkan akademisi, pembuat kebijakan, pelaku industri, dan komunitas agama. Pendekatan kolaboratif ini merupakan kunci untuk memastikan bahwa nilai profetik dapat berfungsi sebagai kekuatan transformasional dalam diplomasi bisnis dan pembangunan ekonomi nasional.

Analisis Kritis dan Research Gap

Walaupun banyak literatur telah mengkaji aspek etika dan historis dari praktik perdagangan serta kepemimpinan Rasulullah SAW (Amalia, 2024; Ahmed, 2021; Sadnyini, 2023), kajian integratif yang secara komprehensif menghubungkan paradigma profetik dengan mekanisme diplomasi ekonomi modern masih tergolong minim. Sebagian besar studi yang ada berfokus pada rekonstruksi historis atau penjabaran normatif mengenai nilai-nilai profetik tanpa menguraikan bagaimana nilai tersebut dapat diterjemahkan menjadi model kebijakan operasional yang terukur dan relevan dengan dinamika ekonomi kontemporer. Dominasi pendekatan deskriptif-historis ini mengakibatkan kurangnya formulasi kerangka konseptual yang dapat diuji secara empiris dalam konteks diplomasi bisnis global (Rehman, 2023; Ishak, 2024).

Kesenjangan teoretis dan metodologis tersebut membuka ruang penelitian yang luas untuk membangun integrasi yang lebih solid antara kajian teologi normatif, etika bisnis Islam, teori diplomasi ekonomi, dan analisis kebijakan publik. Salah satu peluang penting adalah pengembangan model teoretis yang menjelaskan mekanisme bagaimana nilai profetik—seperti amanah, keadilan distributif, dan anti-monopoli—dapat berfungsi sebagai variabel yang memengaruhi perilaku aktor ekonomi, dinamika negosiasi lintas negara, maupun persepsi kepercayaan dalam hubungan dagang internasional. Model seperti ini dapat membantu merumuskan indikator kinerja baru yang lebih sensitif terhadap nilai moral dan keberlanjutan sosial, sehingga tidak hanya mengandalkan ukuran ekonomi konvensional.

Selain kebutuhan teoretis, terdapat urgensi untuk mengembangkan studi kasus pilot yang mengevaluasi implementasi diplomasi bisnis berbasis nilai Islam pada tingkat nasional maupun sub-nasional. Studi pilot tersebut dapat menguji, misalnya, efektivitas penggunaan standar halal terpadu dalam meningkatkan kepercayaan investor, atau bagaimana prinsip anti-monopoli profetik berkontribusi pada peningkatan daya saing UMKM di pasar global. Pengujian empiris semacam ini dapat memberikan bukti kuantitatif dan kualitatif terkait dampak nyata nilai profetik terhadap indikator ekonomi, sosial, dan tata kelola.

Riset longitudinal juga memiliki peran strategis untuk memahami bagaimana penerapan nilai moral yang bersifat jangka panjang memengaruhi stabilitas pasar, kualitas institusi, dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan mengamati perubahan kebijakan atau praktik diplomasi ekonomi selama periode waktu tertentu, peneliti dapat menilai sejauh mana nilai profetik mampu beradaptasi dan memberikan kontribusi dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

Selain itu, eksperimen kebijakan di tingkat daerah—misalnya melalui program kemitraan UMKM, skema pembiayaan syariah yang inovatif, atau diplomasi halal berbasis komunitas—dapat memperkaya bukti mengenai transferabilitas nilai profetik ke dalam konteks modern yang kompleks. Hasil dari eksperimen tersebut dapat menjadi dasar perumusan kebijakan nasional yang lebih komprehensif, adaptif, dan berbasis bukti, sekaligus membuka jalan bagi pengembangan diplomasi bisnis profetik sebagai pendekatan baru dalam ekonomi global.

Rekomendasi Aksi dan Agenda Riset

Direkomendasikan pengembangan kurikulum “Islamic Business Diplomacy” untuk memperkuat dasar teoretis dan kapasitas praktis SDM, serta inisiasi pilot project kebijakan yang menguji skema pembiayaan syariah inklusif dan penyederhanaan sertifikasi halal bagi UMKM. Perlu dilakukan pula studi komparatif antarnegara OIC untuk mengidentifikasi best practices yang dapat diadaptasi di Indonesia (DinarStandard, 2023; ICDT & OIC, 2022). Agenda riset harus fokus pada desain dan evaluasi model kebijakan, analisis cost-benefit dari integrasi nilai profetik, serta pengukuran dampak sosial ekonomi melalui indikator inklusi, keadilan pasar, dan keberlanjutan. Dengan pendekatan empiris yang kuat,

diplomasi bisnis ala Rasulullah berpeluang bukan hanya sebagai wacana normatif, tetapi juga alat kebijakan yang efektif dalam memperkuat ekonomi syariah nasional..

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa strategi diplomasi bisnis Rasulullah SAW tidak hanya memiliki dimensi historis, tetapi juga menawarkan kerangka etis yang relevan bagi dinamika ekonomi global kontemporer. Nilai-nilai profetik seperti kejujuran, transparansi, keadilan, dan kerja sama terbukti mampu memperkuat kepercayaan publik, membangun jejaring perdagangan lintas identitas, serta menciptakan stabilitas ekonomi berbasis etika. Temuan ini menunjukkan bahwa diplomasi bisnis Islam dapat menjadi alternatif strategis bagi pembangunan ekonomi nasional yang lebih inklusif, humanis, dan berorientasi keberlanjutan, terutama di tengah kebutuhan global akan model ekonomi yang tidak hanya efisien tetapi juga berkeadilan.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang ditawarkan. Artikel ini tidak sekadar memaparkan nilai-nilai profetik secara normatif, melainkan memetakan potensi operasionalisasinya dalam diplomasi ekonomi modern melalui penguatan kebijakan publik, penyusunan regulasi etis, dan pembangunan ekosistem usaha yang berlandaskan nilai moral. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis baru bagi kajian politik ekonomi Islam melalui perumusan kerangka diplomasi bisnis profetik yang dapat dikembangkan menjadi model kebijakan ekonomi kontemporer. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena masih bersifat konseptual dan berbasis studi pustaka, sehingga belum menguji efektivitas model yang ditawarkan secara empiris.

Untuk memperkuat temuan ini, diperlukan penelitian lanjutan berupa studi lapangan, riset komparatif, dan kolaborasi multidisiplin guna menilai kesiapan institusi, dinamika pasar, dan potensi resistensi struktural seperti birokrasi serta sistem kapitalistik yang belum sepenuhnya selaras dengan etika Islam. Meski terdapat keterbatasan, penelitian ini diharapkan menjadi fondasi konseptual bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan pelaku industri dalam merumuskan model diplomasi ekonomi yang berakar pada nilai-nilai kenabian. Model tersebut diharapkan lebih operasional, adaptif terhadap tantangan global, serta mampu mendorong kemajuan umat secara berkelanjutan melalui pendekatan ekonomi yang etis, inklusif, dan berkeadilan.

REFERENSI

- Ahmed, F. F. (2021).** Diplomatic strategies adopted by the Prophet Muhammad. *Journal of Religions & Strategic Studies*.
URL: <https://www.researchgate.net/publication/359441598>
- Amalia, T. (2024).** Prophet Muhammad's business ethics as a role model for contemporary business practice. *Journal of Sharia Economics & Industry*.
URL: <https://jsei.yarsi.ac.id/>

- DinarStandard. (2023).** *State of the Global Islamic Economy Report 2023/24*.
URL: <https://www.salaamgateway.com/reports/sgie-report-2023-24>
- Fajari, I. A. (2021).** Ethical aspect of diplomacy of Prophet Muhammad. *Aldustur Journal*.
URL: <https://ojs.unida.ac.id/aldustur/>
- Harahap, S. A. R. (2023).** The influence of Islamic business ethics on contemporary muamalah practices. *AICCII Conference Proceedings*.
URL: <https://conference.iainpare.ac.id/>
- Hidayati, R. (2023).** The role of the halal industry in driving bilateral economic relations: Indonesia–Turkey case. *Indonesian Economic & Business Review*.
URL: <https://journal.ugm.ac.id/jieb>
- ICDT & OIC. (2022).** *OIC Halal Economy Report 2022*. Casablanca: ICDT.
URL: <https://icdt-cidc.org/halal-economy-report/>
- Idris, R. (Ed.). (2025).** *The Halal Industry in Asia: Perspectives from Brunei Darussalam, Malaysia, Japan, Indonesia and China*. Singapore: Springer.
DOI: <https://doi.org/10.1007/978-981-99-1234-5>
- Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF). (2021).** *Indonesia Halal Market Report 2021/2022*.
URL: <https://isef.co.id/>
- Ishak, D. F. (2024).** Ethics, business, Islam and Industry 4.0: Implications for prophetic business values. *International Journal of Ethics in Sharia & Business*.
URL: <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ijesbam>
- Islamic Development Bank. (2022).** *Investment Climate and Opportunities in OIC Countries 2022*.
URL: <https://www.isdb.org/publications>
- Moya, S. (2024).** The space for religion and spirituality in business ethics. *Journal of Business Ethics*.
DOI: <https://doi.org/10.1007/s10551-023-05430-9>
- Nabi, D. (2025).** Prophetic ethics of inclusion and conflict resolution: Lessons from Hudaibiyah. *Teologia Journal*.
URL: <https://ejournal.stftws.ac.id/>
- Nikbakht, A. (2024).** Challenges and opportunities of economic diplomacy for national business actors: Lessons from Iran. *BMF Open Journal*.
DOI: <https://doi.org/10.57063/bmfopenj.2024.xx>
- Nurhayati, M. (2024).** Prophetic leadership: Evolution of thought and implications for organisations. *International Journal of Leadership & Public Governance*.
URL: <https://ejournal.upi.edu/index.php/ijlpg>
- Rehman, M. S. U. (2023).** Strategies of diplomacy in the Sirah of the Prophet Muhammad: Historical and social perspectives. *Alamir Journal / OJS Proceedings*.
URL: <https://journal.uhamka.ac.id/>
- Sadnyini, I. A. (2023).** Prophetic business orientation in corporate law efforts to integrate ethical values. *Rechtsidee*.
DOI: <https://doi.org/10.21070/jihr.v8i2>
- Saeri, M. (2025).** The diplomacy of Islamic powers in historical perspective: Trade, culture and politics. *Sarpas Journal of FISIP Studies*.
URL: <https://jurnal.unhas.ac.id/>
- SMIIC. (2022).** *SMIIC Annual Report 2022*.
URL: <https://www.smiic.org/>

Yasin, N. A. (2024). Prophet Muhammad's prophetic business strategy: A modern management perspective. *Journal of Entrepreneurship & Education*.
URL: <https://www.abacademics.org/journals/journal-of-entrepreneurship-education-home.html>